RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024

email : diskoperasi@kedirikab.go.id

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Tahun 2018 adalah perencanaan teknis operasional tahunan yang merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan kinerja serta efektivitas tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah terwujudnya dunia usaha yang mantap berbasis potensi daerah didukung oleh Koperasi dan Usaha Mikro yang berorientasi pasar.

Rencana Kerja ini diharapkan menjadi salah satu upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas serta dapat dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan terarah. Apabila dalam kurun waktu satu tahun berjalan terjadi perubahan, maka dilakukan langkah penyesuaian dengan situasi dan kondisi obyektif yang terjadi.

Kepada berbagai fihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini kami sampaikan terima kasih, kritik dan saran selalu kami harapkan guna perbaikannya.

Kediri, 2024

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD 11
2.4. Review Terhadap Awal RKPD 14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN 24
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 24
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 24
3.3. Program dan Kegiatan 26

BAB IV PENUTUP 34

- **Lampiran**

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;
3. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;

2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja SKPD yang akan tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor xx Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor xx);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan 2017, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tahun 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk menyiapkan program / kegiatan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Tahun 2025, meliputi :

- BAB I. PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistimatika Penulisan

- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Restra Perangkat Daerah
  - 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4. Review terhadap Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
  - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3. Program Dan Kegiatan

- BAB IV. PENUTUP
  - Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan–tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri selama tahun 2022 dan 2023 dan perkiraan target yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut: Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kediri

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
											I		II		III		IV					
1					2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10 / 5 x 100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	17	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**170.41 %**	**9,025,901,627**	**100%**	**4,424,144,226**		**980,025,833**		**1,265,098,938**		**842,166,443**		**1,100,477,937**	**94.66%**	**4,187,769,151**		**94.66%**
2	17	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**12 Laporan**	**10,355,000**	**6 laporan**	-	-	-	-	-		-		-	**6 laporan**	-	-	**0.00%**
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah laporan perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 Laporan	3,177,700	2 laporan	-	-	-	-	-	-	-	2 laporan	-	2 laporan	-	-	0.00%
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	7,177,300	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-	4 laporan	-	4 laporan	-	-	0.00%
2	17	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**24 Bulan**	**6,701,323,538**	**12 laporan**	**3,676,289,072**	**3 laporan**	**810,610,536**	**3 laporan**	**1,099,372,025**	**3 laporan**	**752,351,003**	**3 laporan**	**828,578,507**	**12 bulan**	**3,490,912,071**	**100%**	**94.96%**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	24 Bulan	5,495,705,938	12 bulan	3,239,885,381	3 bulan	612,431,651	3 bulan	1,027,286,785	3 bulan	670,874,379	3 bulan	749,290,282	12 bulan	3,059,883,097	100%	94.44%
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pegawai	24 Bulan	822,715,500	12 bulan	294,228,800	3 bulan	163,338,885	3 bulan	48,443,740	3 bulan	37,226,624	3 bulan	43,826,625	12 bulan	292,835,874	100%	99.53%
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	24 Bulan	377,152,000	12 bulan	140,023,391	3 bulan	34,840,000	3 bulan	21,490,000	3 bulan	44,250,000	3 bulan	35,461,600	12 bulan	136,041,600	100%	97.16%
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 laporan	5,750,100	1 laporan	2,151,500	-	-	1 laporan	2,151,500	-	-		-	1 laporan	2,151,500	100%	100%
2	17	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**waktu penyediaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah**	**24 Bulan**	**12,518,300**	**12 laporan**	**4,532,900**	**3 laporan**	**-**	**3 laporan**	**32,900**	**6 laporan**	**3,000,000**	**3 laporan**	**1,500,000**	**12 laporan**	**4,532,900**	**100%**	**100%**
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	waktu penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	24 Bulan	12,518,300	12 bulan	4,532,900	3 bulan	-	3 bulan	32,900	6 bulan	3,000,000	3 bulan	1,500,000	12 bulan	4,532,900	100%	100%
2	17	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**waktu penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**24 Bulan**	**542,253,000**	**12 bulan**	**19,147,500**	-	-	-	-	-	-	**43 orang**	**17,415,000**	**43 orang**	**17,415,000**	**100%**	**90.95%**
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti diklat	1 Orang	7,500,000	43 orang	19,147,500	-	-	-	-	-	-	43 orang	17,415,000	43 orang	17,415,000	100%	90.95%

2	17	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	1500 Orang	534,753,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.00%
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**24 Bulan**	**670,111,780**	**12 bulan**	**485,908,042**	**3 bulan**	**138,136,577**	**3 bulan**	**99,397,566**	**3 bulan**	**43,973,905**	**3 bulan**	**174,749,978**	**12 bulan**	**456,258,026**	**100%**	**93.90%**
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24 Bulan	17,123,965	12 bulan	6,276,905	-	-	-	-	-	-	12 bulan	6,140,635	12 bulan	6,140,635	-	97.83%
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	45 Unit	317,610,350	27 paket	238,663,757	11 paket	78,863,900	4 paket	73,800,000	-	-	12 paket	63,518,700	27 paket	216,182,600	100%	90.58%
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga	24 Bulan	54,192,977	12 bulan	46,085,280	3 bulan	5,962,200	-	-	-	-	3 bulan	37,455,800	12 bulan	43,418,000	100%	94.21%
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24 Bulan	48,890,358	12 bulan	30,658,900	3 bulan	16,737,400	3 bulan	551,800	3 bulan	489,000	3 bulan	12,500,500	12 bulan	30,278,700	100%	98.76%
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	waktu penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan	24 Bulan	9,896,000	12 bulan	3,457,200	3 bulan	855,000	3 bulan	855,000	3 bulan	855,000	3 bulan	855,000	12 bulan	3,420,000	100%	98.92%
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	waktu penyediaan mamin rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	24 Bulan	222,398,130	12 bulan	160,766,000	3 bulan	35,718,077	3 bulan	24,190,766	3 bulan	42,629,905	3 bulan	54,279,343	12 bulan	156,818,091	100%	97.54%
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	waktu penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.00%
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah barang milik daerah yang di adakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**88 Unit**	**366,996,900**	**26 unit**	**21,875,730**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 unit**	**21,190,000**	**26 unit**	**21,190,000**	**100%**	**96.87%**
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebeler yang diadakan	88 Unit	366,996,900	26 unit	21,875,730	-	-	-	-	-	-	26 unit	21,190,000	26 unit	21,190,000	100%	96.87%
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**24 Bulan**	**159,297,089**	**12 bulan**	**96,206,050**	**3 bulan**	**21,995,420**	**3 bulan**	**17,203,547**	**3 bulan**	**16,513,735**	**3 bulan**	**22,439,452**	**12 bulan**	**78,152,154**	**100%**	**81.23%**
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	24 Bulan	11,040,000	12 bulan	3,000,000	4 bulan	1,000,000	-	-	-	-	8 bulan	2,000,000	12 bulan	3,000,000	100%	100.00%
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 Bulan	148,257,089	12 bulan	93,206,050	3 bulan	20,995,420	3 bulan	17,203,547	3 bulan	16,513,735	3 bulan	20,439,452	12 bulan	75,152,154	100%	80.63%
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara**	**68 Unit**	**563,046,020**	**64 unit**	**120,184,932**	**7 unit**	**9,283,300**	**14 unit**	**49,092,900**	**15 unit**	**26,327,800**	**22 unit**	**34,605,000**	**64 unit**	**119,309,000**	**100%**	**99.27%**
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang di lakukan pemeliharaan rutin dan perizinannnya	30 Unit	60,453,500	35 unit	50,100,000	3 unit	4,783,300	9 unit	9,975,900	10 unit	20,155,800	13 unit	14,730,000	35 unit	49,645,000	100%	99.09%

2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	34 Unit	54,150,000	28 unit	37,300,000	4 unit	4,500,000	5 unit	6,700,000	5 unit	6,172,000	9 unit	19,875,000	28 unit	37,247,000	100%	99.86%
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang di lakukan pemeliharaan rutin/berkala	4 Gedung Kantor	448,442,520	1 gedung kantor	32,784,932	-	-	1 gedung kantor	32,417,000	-	-	0	-	1 gedung kantor	32,417,000	100%	98.88%
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Tingkat pengawasanKoperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi**	**99.79%**	**699,497,200**	**17.36%**	**196,161,750**		**46,796,544**		**71,438,090**		**16,541,907**		**51,669,933**	**20.67%**	**186,446,474**		**95.05%**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi**	**614 Koperasi**	**699,497,200**	**178 koperasi**	**196,161,750**	**62 koperasi**	**46,796,544**	**29 koperasi**	**71,438,090**	**13 koperasi**	**16,541,907**	**74 koperasi**	**51,669,933**	**178 unit usaha**	**186,446,474**	**100.0%**	**95.05%**
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang di peringkatkan, di monev(pengawasan dan pemeriksaan), yang mengikuti bimtek pemeringkatan dan sosialisasi pra dan hasil pengawasan koperasi	209 Koperasi	328,499,800	78 unit usaha	126,260,100	12 unit usaha	15,111,644	29 unit usaha	71,438,090	13 unit usaha	16,541,907	24 unit	13,802,433	78 unit	116,894,074	100.0%	92.58%
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan, revitalisasi koperasi dan peserta studi banding perkoperasian	405 Orang	370,997,400	100 unit usaha	69,901,650	50 unit usaha	31,684,900	-	-	-	-	50 unit usaha	37,867,500	100 unit usaha	69,552,400	100%	99.50%
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat**	**95.61%**	**56,021,700**	**1,70 %**	**51,557,860**	**-**	**9,360,000**		**16,659,400**		**1,530,000**		**19,209,860**	**14.89%**	**46,759,260**		**90.69%**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya**	**245 Koperasi**	**56,021,700**	**235 koperasi**	**51,557,860**	**30 koperasi**	**9,360,000**	**75 koperasi**	**16,659,400**	**5 koperasi**	**1,530,000**	**125 koperasi**	**19,209,860**	**235 koperasi**	**46,759,260**	**100%**	**90.69%**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya dan yang mengikuti bimtek penilaian kesehatan	245 Koperasi	56,021,700	235 koperasi	51,557,860	30 koperasi	9,360,000	75 koperasi	16,659,400	5 koperasi	1,530,000	125 koperasi	19,209,860	235 koperasi	46,759,260	100%	90.69%
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.00%
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi terlatih**	**91.79%**	**1,199,945,700**	**0,18 %**	**502,918,208**		**39,226,400**		**68,670,800**		**112,249,200**		**274,171,108**	**0.37%**	**494,317,508**		**98.29%**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian**	**826 Orang**	**1,084,329,700**	**488 orang**	**502,918,208**	**30 orang**	**39,226,400**	**60 orang**	**68,670,800**	**126 orang**	**112,249,200**	**272 orang**	**274,171,108**	**488 orang**	**494,317,508**	**100%**	**98.29%**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	826 Orang	1,084,329,700	488 orang	502,918,208	30 orang	39,226,400	60 orang	68,670,800	126 orang	112,249,200	272 orang	274,171,108	488 orang	494,317,508	100%	98.29%
2	**17**	**05**	**2.03**		**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah peserta pendidikan dan latihan SDM usaha mikro**	**6 Kegiatan**	**183,313,560**	**90 orang**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**0%**	**#DIV/0!**
2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro	6 Kegiatan	183,313,560	90 orang	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0%	#DIV/0!

2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Partisipasi Koperasi Aktif**	**111.21 %**	**1,780,712,317**	**33,16%**	**1,445,519,310**	**10 orang**	**39,746,060**	**10 orang**	**36,184,220**	**180 orang**	**364,955,868**	**43 orang**	**985,513,250**	**28.22%**	**1,426,399,398**		**98.68%**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan**	**340 Orang**	**1,780,712,317**	**243 orang**	**1,445,519,310**	**10 orang**	**39,746,060**	**10 orang**	**36,184,220**	**180 orang**	**364,955,868**	**43 orang**	**985,513,250**	**243 orang**	**1,426,399,398**	**100%**	**98.68%**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta peringatan hari koperasi dan SDM koperasi yang di tingkatkan kapasitasnya	340 Orang	1,780,712,317	243 orang	1,445,519,310	10 orang	39,746,060	10 orang	36,184,220	180 orang	364,955,868	43 orang	985,513,250	243 orang	1,426,399,398	100%	98.68%
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Partisipasi Usaha Mikro**	**151.46 %**	**8,246,648,858**	**25,22%**	**2,694,383,100**		**577,613,238**		**580,709,470**		**503,310,640**		**901,962,898**	**20.08%**	**2,563,596,246**		**95.15%**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitasi perizinan,sosialisasi perijinan dan pengembangan produk dan SDM UMKM**	**3108 Orang**	**8,246,648,858**	**2160 orang**	**2,694,383,100**	**660 orang**	**577,613,238**	**506 orang**	**580,709,470**	**373 orang**	**503,310,640**	**712 orang**	**901,962,898**	**2160 orang**	**2,563,596,246**	**100%**	**95.15%**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang terdata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.00%
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang di fasilitas kemitraan	40 Orang	9,289,125	20 orang	10,617,900	-	-	-	-	-	-	20 orang	7,244,000	20 orang	7,244,000	100%	68.22%
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi perizinan dan sosialisasi perizinan	855 Orang	483,283,840	215 orang	121,184,200	60 orang	26,594,800	46 orang	29,539,600	79 orang	36,714,800	58 orang	13,977,500	215 orang	106,826,700	100%	88.15%
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaannya dan dikembangkan usahanya	2206 Orang	7,713,621,900	1215 unit usaha	1,703,886,700	260 orang	255,597,066	290 orang	371,848,835	220 orang	314,632,366	320 orang	722,326,566	1215 orang	1,664,404,833	100%	97.68%
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro	6 Kegiatan	40,453,993	160 orang	60,060,000	120 orang	29,560,256	50 orang	18,836,000	4 orang	5,492,008	174 orang	4,898,016	160 orang	58,786,280	100%	97.88%
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	-	550 orang	798,634,300	220 orang	265,861,116	120 orang	160,485,035	70 orang	146,471,466	140 orang	153,516,816	550 orang	726,334,433	100%	90.95%
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya**	**74.42%**	**8,203,219,537**	**7,95%**	**1,752,706,800**		**33,557,400**		**513,567,350**		**292,771,048**		**809,469,792**	**9.43%**	**1,649,365,590**		**94.10%**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran**	**1060 Orang**	**8,203,219,537**	**664 orang**	**1,752,706,800**	**90 orang**	**33,557,400**	**210 orang**	**513,567,350**	**202 orang**	**292,771,048**	**162 orang**	**809,469,792**	**664 orang**	**1,649,365,590**	**100%**	**94.10%**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan pelatihan	1060 Orang	8,203,219,537	664 orang	1,752,706,800	90 orang	33,557,400	210 orang	513,567,350	202 orang	292,771,048	162 orang	809,469,792	664 orang	1,649,365,590	103%	94.10%

- **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

  Pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan pada sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro tidak dapat memenuhi target di karenakan untuk kegiatan bantuan melalui rekening belanja barang yang di serahkan pada masyarkat tidak bisa terlaksana di karenakan berdasarkan hasil verifikasi tidak ada penerima yang dapat memenuhi persyaratan penerimaan dengan Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro dengan target 1.215 orang terealisasi 1.090 orang atau sebesar 89,71%.

- **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

  Pada program Program Pengembangan UMKM pada sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan indikator Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan pelatihan dengan target 778 orang terealisasi 778 orang sehingga capaian indikator sub kegiatan ini mencapai 100,00%.

  Pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang memiliki indikator sub kegiatan jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 243 orang terealisasi 243 orang sehingga capaian indikator sub kegiatan ini mencapai 100.00%.

Pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi pada sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota indikator kegiatan jumlah unit usaha koperasi yang telah di lakukan penialaian kesehatan dengan target sebesar 235 koperasi terealisasi 235 koperasi sehingga capaian indikator sub kegiatan sebesar 100,00%.

- **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro dengan target 300 orang yang terealisasi 313 kegiatan sehingga capaian indikator sub kegiatan ini sebesar 104,33%

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	2023			Sumber Data
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Indeks Pengeluaran	1.062.451	963.850	90,72%	BPS

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran RENSTRA 2021-2026 ditampilkan pada tabel berikut ini

Tabel 2.3
Capaian indikator kinerja sesuai tujuan dan sasaran RENSTRA 2021-2026
Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	SUMBER DATA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	SUMBER DATA
Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi dan usaha mikro	1. Pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya	34.62%	41.34%	Database koperasi (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)	1. Meningkatnya kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi	Persentase koperasi aktif	61.58%	61.67%	Data Keragaan Koperasi (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)
	1. Persentase peningkatan kualitas usaha mikro	14.96%	17.27%	Database usaha Mikro (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)	2. Meningkatnya jumlah dan volume usaha mikro	Pertumbuhan usaha mikro	5.93%	9.99%	Database usaha Mikro (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel : 2.4
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. KEDIRI TAHUN 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Hasil) / Kegiatan (Outcome) /sub kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**4.424.144.226**	**94,66%**	**4.187.769.151**		**94,66%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**6 laporan**	**-**	**6 laporan**	**-**	**-**	**0,00%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah laporan perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 laporan	-	2 laporan	-	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	-	4 laporan	-	-	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 laporan**	**3.676.289.072**	**12 bulan**	**3.490.912.071**	**100%**	**94,96%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.239.885.381	12 bulan	3.059.883.097	100%	94,44%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pegawai	12 bulan	294.228.800	12 bulan	292.835.874	100%	99,53%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	140.023.391	12 bulan	136.041.600	100%	97,16%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	2.151.500	1 laporan	2.151.500	100%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Hasil) / Kegiatan (Outcome) /sub kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**waktu penyediaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah**	**12 laporan**	**4.532.900**	**12 laporan**	**4.532.900**	**100%**	**100%**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	waktu penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 bulan	4.532.900	12 bulan	4.532.900	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**waktu penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 bulan**	**19.147.500**	**43 orang**	**17.415.000**	**100%**	**90,95%**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti diklat	43 orang	19.147.500	43 orang	17.415.000	100%	90,95%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**485.908.042**	**12 bulan**	**456.258.026**	**100%**	**93,90%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	6.276.905	12 bulan	6.140.635	100%	97,83%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	27 paket	238.663.757	27 paket	216.182.600	100%	90,58%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga	12 bulan	46.085.280	12 bulan	43.418.000	100%	94,21%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	30.658.900	12 bulan	30.278.700	100%	98,76%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	waktu penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.457.200	12 bulan	3.420.000	100%	98,92%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	waktu penyediaan mamin rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	160.766.000	12 bulan	156.818.091	100%	97,54%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Hasil) / Kegiatan (Outcome) /sub kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**jumlah barang milik daerah yang di adakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**26 unit**	**21.875.730**	**26 unit**	**21.190.000**	**100%**	**96,87%**
Pengadaan Mebel	jumlah mebeler yang diadakan	26 unit	21.875.730	26 unit	21.190.000	100%	96,87%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 bulan**	**96.206.050**	**12 bulan**	**78.152.154**	**100%**	**81,23%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	100%	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	93.206.050	12 bulan	75.152.154	100%	80,63%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara**	**64 unit**	**120.184.932**	**64 unit**	**119.309.000**	**100%**	**99,27%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang di lakukan pemeliharaan rutin dan perizinannnya	35 unit	50.100.000	35 unit	49.645.000	100%	99,09%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	28 unit	37.300.000	28 unit	37.247.000	100%	99,86%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang di lakukan pemeliharaan rutin/berkala	1 gedung kantor	32.784.932	1 gedung kantor	32.417.000	100%	98,88%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Tingkat pengawasanKoperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi**	**11,53%**	**196.161.750**	**20.67%**	**186.446.474**	**179,27%**	**95,05%**
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi**	**178 koperasi**	**196.161.750**	**178 unit usaha**	**186.446.474**	100,0%	92,58%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Hasil) / Kegiatan (Outcome) /sub kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)	
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang di peringkatkan, di monev(pengawasan dan pemeriksaan), yang mengikuti bimtek pemeringkatan dan sosialisasi pra dan hasil pengawasan koperasi	78 unit usaha	126.260.100	78 unit	116.894.074	100%	99,50%
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan, revitalisasi koperasi dan peserta studi banding perkoperasian	100 unit usaha	69.901.650	100 unit usaha	69.552.400	100%	99,50%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat**	**1.70%**	**51.557.860**	**14.89%**	**46.759.260**	**875,88%**	**90,69%**
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya**	**235 koperasi**	**51.557.860**	**235 koperasi**	**46.759.260**	**100%**	**90,69%**
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya dan yang mengikuti bimtek penilaian kesehatan	235 koperasi	51.557.860	235 koperasi	46.759.260	100%	90,69%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase SDM Koperasi terlatih**	**0.18%**	**502.918.208**	**0.37%**	**494.317.508**	**205,56%**	**98,29%**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian**	**488 orang**	**502.918.208**	**488 orang**	**494.317.508**	**100%**	**98,29%**
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	488 orang	502.918.208	488 orang	494.317.508	100%	98,29%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Hasil) / Kegiatan (Outcome) /sub kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Partisipasi Koperasi Aktif**	**20.25%**	**1,792,682,500**	**28.22%**	**1.426.399.398**	**139,36%**	**98,68%**
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan**	**243 orang**	**1,792,682,500**	**243 orang**	**1.426.399.398**	**100%**	**98,68%**
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta peringatan hari koperasi dan SDM koperasi yang di tingkatkan kapasitasnya	243 orang	1,792,682,500	243 orang	1.426.399.398	100%	98,68%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Partisipasi Usaha Mikro**	**25.22%**	**3,051,772,425**	**24.96%**	**2.563.596.246**	**99,17%**	**95,15%**
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitasi perizinan,sosialisasi perijinan dan pengembangan produk dan SDM UMKM**	**2160 orang**	**3,051,772,425**	**2160 orang**	**2.563.596.246**	**100%**	**95,15%**
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang di fasilitas kemitraan	20 orang	24,205,125	20 orang	7.244.000	100%	68,22%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi perizinan dan sosialisasi perizinan	215 orang	337,424,300	215 orang	106.826.700	100%	88,15%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Hasil) / Kegiatan (Outcome) /sub kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaannya dan dikembangkan usahanya	1215 unit usaha	2,641,885,000	1215 orang	1.664.404.833	100%	97,68%
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro	160 orang	48,258,000	160 orang	58.786.280	100%	97,88%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	550 orang	798.634.300	550 orang	726.334.433	100%	90,95%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya**	**7.95%**	**8,081,473,600**	**9.43%**	**1.649.365.590**	**118,62%**	**94,10%**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran**	**664 orang**	**8,081,473,600**	**664 orang**	**1.649.365.590**	**100%**	**94,10%**
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan pelatihan	664 orang	8,081,473,600	664 orang	1.649.365.590	103%	94,10%
JUMLAH			**11.067.391.254**		**10.554.653.627**		**95,37%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yaitu bisa dilihat dari koperasi aktif yang terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Koperasi Aktif Di Kabupaten Kediri

NO	URAIAN	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Berdasarkan Status Keaktifan	789	844	862

Sumber data: Keragaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dari data terlihat jumlah koperasi aktif di Kabupaten Kediri terus meningkat hal ini tentu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah di lakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui kegiatan-kegiatan penilaian kesehatan koperasi, pemeringkatan koperasi, revitalisasi koperasi serta peningkatan pemahaman dan pengetahuan SDM koperasi melalui bimtek dan sosialisasi serta pemanfaatan pengawasan koperasi dengan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi SAPPAKOP.

Dengan semakin bertambah dan berkembangnya wirausaha baru di Kabupaten Kediri maka perkembangan Usaha Mikro juga mengalami peningkatan hal tersebut tak lepas dari peran pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Kediri untuk selalu mendukung tumbuh kembangnya Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Kediri melalui pembinaan, pelatihan, mengikut sertakan Usaha Mikro mengikuti pameran diberbagai event terus dilakukan, pemberian fasilitas promosi baik melalui media elektronik dan cetak, media promosi melalui website (umkm.kedirikab.go.id) serta pemberian Modal kerja terhadap Usaha Mikro melaui dana bergulir.

Pertumbuhan jumlah usaha mikro di Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan dengan data sebagai berikut

Tabel 2.3
Data Usaha Mikro yang Terdata

NO	URAIAN	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Usaha mikro yang terdata	8.616	9.475	10.422

Sumber data : Database Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Pengembangan usaha skala mikro tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Di samping itu dikembangkan budaya usaha dan kewirausahaan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan penyuluhan.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro

Kabupaten Kediri

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya	-	Ada	25,00%	30,00%	34,62%	37,14%	31,25%	38,09%	41.34%	32,95	
2	Persentase peningkatan kualitas usaha mikro	-	Ada	5,19%	14,55%	14,96%	15,45%	5,34%	16,37%	17.27%	16,98%	
3	Persentase koperasi aktif	-	Ada	58,02%	60,35%	61,58%	62,95%	55,76%	61,26%	61.67%	61,86%	
4	Pertumbuhan usaha mikro	-	Ada	4,52%	5,84%	5,93%	6,18%	7,62%	9,97%	9.99%	9,95%	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Identifikasi Permasalahan berdasarkanTupoksi

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan

Secara Umum permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jiwa kewirausahaan dan kemandirian dari usaha mikro;
2. Kurangnya pemahaman legalitas usaha sebagai upaya untuk memberikan identitas dan perlindungan terhadap produk usaha mikro serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk usaha mikro;
3. Perlunya peningkatan kualitas/standar produk usaha mikro agar berdaya saing dan berdaya jual;
4. Kurangnya diversifikasi terhadap usaha koperasi dan perlunya role model koperasi modern;
5. Kurangnya SDM koperasi yang terlatih dalam penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas dan kinerja koperasi dan kurangnya ketertarikan generasi muda terhadap koperasi.

Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri meliputi:

- **Tantangan**

1. Keterbatasan Akses Keuangan: Banyak koperasi dan usaha mikro menghadapi sulitnya mendapatkan akses ke modal dan kredit yang terjangkau.
2. Pasar yang Kompetitif: Bersaing dengan perusahaan besar dan kompetitor lainnya bisa sulit bagi usaha mikro dan koperasi yang lebih kecil.

3. Manajemen dan Keahlian: Kekurangan dalam pengelolaan bisnis, manajemen risiko, dan kekurangan keahlian manajerial bisa menjadi tantangan serius.
4. Infrastruktur yang Kurang Mendukung: Ketersediaan infrastruktur seperti jaringan transportasi, listrik, dan komunikasi sering kali masih kurang di daerah pedesaan atau perkotaan yang sedang berkembang.

- **Peluang**
  1. Peningkatan Kesadaran dan Dukungan: Pemerintah dan organisasi non-pemerintah semakin menyadari peran penting koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan ekonomi inklusif.
  2. Inovasi Teknologi: Teknologi digital dapat meningkatkan aksesibilitas pasar, manajemen inventaris, dan layanan keuangan untuk koperasi dan usaha mikro.
  3. Peningkatan Kesadaran Lingkungan: Adopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing dan mendapatkan dukungan dari konsumen yang peduli lingkungan.
  4. Pengembangan Keterampilan dan Pelatihan: Program pelatihan dan pendidikan yang disesuaikan dapat membantu memperkuat manajemen dan keterampilan teknis di dalam koperasi dan usaha mikro.
  5. Kemitraan dan Jaringan: Memanfaatkan kemitraan dengan organisasi lain atau jaringan bisnis dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan dukungan.

2.4 Review Terhadap Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta

kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri sebagaimana tersebut dalam tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5
Review terhadap RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kediri

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**5,166,938,827**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**5,166,938,827**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**7 laporan**	**16,955,600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**7 laporan**	**16,955,600**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.911.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.911.600	penyusunan dokumen perencanaan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.044.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.044.000	penyusunan laporan kinerja

II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**4,024,168,803**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**4,024,168,803**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3,836,933,799	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3,836,933,799	belanja gaji dan TPP ASN
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	180,675,704	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	180,675,704	belanja HR pengelola keuangan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,559,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,559,300	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
III	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**jumlah peserta pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**45 orang**	**7,870,000**	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**jumlah peserta pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**45 orang**	**7,870,000**	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	7,870,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	7,870,000	Belanja diklat pehawai
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**340,918,600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**340,918,600**	

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19,547,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19,547,500	belanja komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	78,450,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	78,450,500	belanja peralatan dan perlengkapan kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	19,022,400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	19,022,400	belanja alat dan bahan kebersihan, belanja modal peralatan rumah tangga kantor
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	29,265,600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	29,265,600	belanja cetak lembar disposisi, SPPD, map dan amplop dinas
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,547,600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,547,600	belanja langganan surat kabar
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127,544,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127,544,000	belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	64,541,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	64,541,000	
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**jumlah barang milik daerah yang di adakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**94 unit**	**202,781,310**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**jumlah barang milik daerah yang di adakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**94 unit**	**202,781,310**	

1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	180,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	180,000,000	
2	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	22,781,310	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	22,781,310	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 bulan**	**376,167,600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 bulan**	**376,167,600**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,000,000	belanja materai, materai teraan dan paket pengiriman
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	110,166,600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	110,166,600	belanja tagihan listrik dan telepon
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	262,001,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	262,001,000	HR tenaga kontrak
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara**	**55 unit**	**198,076,914**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara**	**55 unit**	**198,076,914**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	44,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	44,000,000	belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan pajak kendaraan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	55,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	55,000,000	Belanja pemeliharaan dan peralatan mesin kantor
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	99,076,914	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	99,076,914	Belanja pemeliharaan gedung kantor

B	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi**	**13.04 %**	**149,667,300**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi**	**13.04 %**	**149,667,300**	
I	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Kediri**	**Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi**	**200 unit usaha**	**149,667,300**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Kediri**	**Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi**	**200 unit usaha**	**149,667,300**	
1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Kediri	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125 Unit Usaha	121,699,000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Kediri	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125 Unit Usaha	121,699,000	Pemeringkatan koperasi dan pengawasan koperasi
2	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	75 Unit Usaha	27,968,300	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	75 Unit Usaha	27,968,300	Monev pengawasan koperasi, Revitalisasi Koperasi
C	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat**	**1.71 %**	**20,006,400**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat**	**1.71 %**	**20,006,400**	
I	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya**	**460 unit usaha**	**20,006,400**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya**	**460 unit usaha**	**20,006,400**	
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	460 Unit Usaha	20,006,400	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	460 Unit Usaha	20,006,400	Penilaian kesehatan koperasi
D	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase SDM Koperasi terlatih**	**0,22%**	**486,264,200**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase SDM Koperasi terlatih**	**0,22%**	**486,264,200**	

I	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah peserta kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian**	**285 orang**	**77,152,100**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah peserta kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian**	**285 orang**	**77,152,100**	
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	285 Orang	77,152,100	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	285 Orang	77,152,100	Bimtek penguatan kelembagaan koperasi, sosialisasi perkoperasianUP2PKK, bimtek manajemen organisasi koperasi, dan diklat SKKNI
E	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Partisipasi Koperasi Aktif**	**33,67%**	**1,212,861,730**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Partisipasi Koperasi Aktif**	**33,67%**	**1,212,861,730**	
I	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan**	**3 kegiatan**	**1,212,861,730**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan**	**3 kegiatan**	**1,212,861,730**	
1	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	290 Unit Usaha	344,932,060	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	290 Unit Usaha	344,932,060	Pembinaan dan pendampingan koperasi aktif dalam rangka pemberdayaan, peringatan hari koperasi dan hibah uang bagi koperasi
F	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Partisipasi Usaha Mikro**	**26.02 %**	**1,975,546,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Partisipasi Usaha Mikro**	**26.02 %**	**1,975,546,000**	

I	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitasi perizinan,sosialisasi perijinan dan pengembangan produk dan SDM UMKM**	**2460 orang**	**1,975,546,000**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitasi perizinan,sosialisasi perijinan dan pengembangan produk dan SDM UMKM**	**2460 orang**	**1,975,546,000**	
1	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	19,188,000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	19,188,000	Fasilitasi kemitraan bagi UMKM
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	125 unit usaha	72,060,100	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	125 unit usaha	72,060,100	Sosialisasi PIRT, fasilitasi merk, fasilitasi PIRT
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	630 Unit Usaha	7,911,600	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	630 Unit Usaha	7,911,600	Pelatihan pemberdayaan UMKM, pendampingan UMKM, pelatihan penguatan dan kemasan, pelatihan untuk wirausaha baru
4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	640 Orang	9,044,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	640 Orang	9,044,000	Kegiatan sinkronisasi pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro

6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	**510 Orang**	**365,950,700**	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	**510 Orang**	**365,950,700**	Pelatihan pemasaran, bagi hasil dana bergulir, pendampingan usaha mikro
G	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya**	**8.27 %**	**7,681,570,400**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya**	**8.27 %**	**7,681,570,400**	
I	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran**	**1120 orang**	**7,681,570,400**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran**	**1120 orang**	**7,681,570,400**	
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Kediri dan luar kabupaten kediri	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1120 Unit Usaha	7,681,570,400	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Kediri dan luar kabupaten kediri	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1120 Unit Usaha	7,681,570,400	Pameran dalam daerah, , konsultasi klinik KUMKM
TOTAL					**15,415,813,087**	**TOTAL**				**15,415,813,087**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Gerakan Koperasi / Proposal Koperasi dan Usaha Mikro dan pihak-pihak terkait yang lain yang disajikan dalam tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ URAIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				
1	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				
	• Pelatihan Packaging dengan Peserta UMKM Se-Kecamatan Puncu (8 Desa)	Kecamatan Puncu Kab. Kediri	Peningkatan nilai jual kemasan produk UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	• Pelatihan pengolahan jagung (marning) untuk kelompok UMKM desa gabru	desa gabru kecamatan gurah	Diversifikasi produk turunan jagung	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	• Pelatihan memasak (UMKM) kue kering untuk UMKM desa selosari	Desa Selosari Kecamatan Kandat	Peningkatan ketrampilan masyarakat	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	• Pelatihan Ketrampilan Ekonomi Bagi Perempuan (UMKM) membuat keripik Buah dan sayur untuk UMKM desa Blabak	Desa Blabak, Kec. Kandat	Peningkatan ketrampilan masyarakat	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	• Pelatihan Pengemasan dan Penjualan Online untuk UMKM desa Kandat	Desa Kandat Kecamatan Kandat	Peningkatan nilai jual produk UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ URAIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	• Meningkatkan produktifitas UMKM dengan meningkatkan tampilan packaging produk	Desa Sambirejo Kecamatan Pare	Peningkatan nilai jual produk UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	• Meningkatkan kapasitas umkm dan petani Nanas di desa sugihwaras, perlunya pelatihan pengolahan olahan nanas	Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar	Diversifikasi olahan produk turunan nanas	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	• Pelatihan memasak kue basah untuk UMKM se kecamatan kunjang	Kecamatan Kunjang, Kab. Kediri	Penumbuhan wirausaha baru	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	• Pelatihan Pengemasan untuk UMKM Desa Tiron dan Desa Maron	Desa Tiron dan Desa Maron Kec. Banyakan	Peningkatan kemasan dan mutu produk UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	• Pelatihan kemasan untuk UMKM desa banggle	Desa Banggle Kec. Ngadiluwih	Peningkatan kemasan dan mutu produk UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	• Pelatihan pembuatan kue untuk UMKM seluruh desa di Kecamatan Plemahan	Kecamatan Plemahan, Kab. Kediri	Peningkatan ketrampilan dan penumbuhan wirausaha baru	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	• Pelatihan packaging untuk UMKM di semua desa Kecamatan Plemahan	Kecamatan Plemahan, Kab. Kediri	Peningkatan kemasan dan mutu produk UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	• Pelatihan pembuatan tas rajut untuk UMKM di Desa Doko	Desa Doko Kec. Ngasem, Kab. Kediri	Peningkatan ketrampilan masyarakat	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	- Pelatihan Pemasaran UMKM	Desa Deyeng Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri	Peningkatan promosi dan pasar produk UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ URAIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	- Pelatihan Pemasaran bagi UMKM	Desa Ngebrak , Kab. Kediri	Peningkatan kemampuan mengakses teknologi bagi UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	- Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap E - Marketing sehingga belum bisa menjangkau pasar luar wilayah	desa Bringin, Kab. Kediri	Peningkatan pangsa pasar produk UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	- pelatihan digital marketing untuk UMKM	Desa Dukuh Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri	Peningkatan pangsa pasar produk UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	- pelatihan digital marketing untuk UMKM	Desa Petok Kec. Mojo, Kab. Kediri	Peningkatan pangsa pasar produk UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	- pelatihan digital marketing untuk Pelaku UMKM	Desa Semen Kec. Pagu, Kab. Kediri	Peningkatan pendapatan usaha mikro	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	- Pelatihan, Pemasaran dan Pendampingan UMKM	Desa Bulu, Selopanggung dan Titik Kec. Semen, Kab. Kediri	Peningkatan pendapatan usaha mikro	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
	- Pelatihan UMKM (digital marketing)	Desa Panjer Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri	Peningkatan kemampuan mengakses teknologi bagi UMKM	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024
II	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				
1	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
	• Kurangnya pemahaman masyarakat dalam managemen berkoperasi terkait Kepengurusan Koperasi, KUD dan BUMDesa yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat	Desa Badas Kecamatan Badas	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan SDM koperasi terkait tata kelola kelembagaan koperasi	1 Paket	di usulkan di APBD tahun 2024

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam menyusun program dan kegiatan sudah menyesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yaitu Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dan didukung oleh program-program yang lain sesuai dengan potensi daerah. Sinkronisasi program kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di dasarkan atas RPJMN.

Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 adalah Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:

a. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
b. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
c. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
d. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up;
e. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi diarahkan: (1) sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T), dan (2) terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.

Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja

dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri

3. 2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi. Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktifitas kinerja usaha yang memiliki daya saing global dan memberikan dukungan kemudahan dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas produksi yang berorientasi pasar;
2. Menjalin kemitraan antar koperasi, usaha mikro, perusahaan besar, dan pemerintah baik pusat maupun daerah;
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk menumbuhkan wirausaha baru yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar lebih produktif;
4. Mengembangkan lembaga keuangan mikro guna memperkuat usaha koperasi dan Usaha Mikro, dengan meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi melalui pelatihan dan pendampingan teknis serta manajemen Koperasi;
5. Memperluas pasar melalui kegiatan pameran sebagai sarana promosi baik di tingkat lokal maupun nasional;
6. Meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektifitas tatanan administrasi dinas.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan

misi. Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menetapkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi dan usaha mikro.

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula
Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi dan usaha mikro	Pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya	jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya tahun N dikurangi jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya tahun N-1 dibagi jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya tahun N-1 x 100%
	Persentase peningkatan kualitas usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang meningkat kualitasnya / Jumlah usaha mikro yang terdata

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri menetapkan sasaran :

1. Peningkatan produktifitas kerja guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk;
2. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama usaha dan peluang usaha serta info usaha;
3. Peningkatan kualitas kinerja SDM pengelola koperasi yang sehat dan berkualitas serta terjalinnya kemitraan usaha yang berdasarkan pada pertambahan nilai dan hubungan yang saling menguntungkan;
4. Mengembangkan usaha produk Usaha Mikro yang berkualitas sesuai sektor pasar berbasis potensi daerah;
5. Meningkatkan kualitas produktifitas kinerja pegawai, dengan mengutamakan efisiensi dan efektifitas tatanan administrasi dinas.

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri menetapkan sasaran :

1. Meningkatnya kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi;
2. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro dan daya saing usaha mikro.

Sasaran		Indikator Sasaran	Formula
1	Meningkatnya kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT / Jumlah koperasi aktif x 100%
2	Meningkatnya jumlah dan volume usaha mikro	Pertumbuhan usaha mikro	jumlah usaha mikro tahun ini - jumlah usaha mikro tahun lalu di bagi jumlah usaha mikro tahun lalu x 100%

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan koperasi dan usaha mikro Kabupaten Kediri tahun 2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tahun 2023 ditampilkan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani			
MISI 3 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi dan usaha mikro	**SASARAN I :** Meningkatnya kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi	1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi	1. Penumbuhan koperasi milenial, koperasi unggulan kecamatan dan koperasi modern 2. Peningkatan kesehatan koperasi 3. Peningkatan kualitas SDM koperasi
		2. Peningkatan koperasi aktif	1. Peningkatan pengawasan koperasi melalui pelaporan koperasi secara online 2. Pemberdayaan koperasi
	SASARAN 2 : Meningkatnya jumlah dan volume usaha mikro	1. Peningkatan daya saing melalui penerapan HAKI, sertifikasi dan legalitas usaha produk usaha mikro	1. Sosialisasi dan Fasilitasi Penerapan HAKI, sertifikasi dan legalitas usaha produk usaha mikro
		2. Peningkatan kualitas dan inovasi produk usaha mikro	1. Pengembangan komoditas unggulan 2. Penguatan dan penumbuhan wirausaha baru 3. Meningkatkan kemampuan SDM usaha mikro dalam menjalankan usaha, menghasilkan produk dan memasarkan produknya melalui kegiatan bimtek, pelatihan dan pendampingan 4. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam melakukan produksi
		3. Peningkatan kemitraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan pemasaran	1. Fasilitasi pemasaran produk usaha mikro dalam skala lokal, regional dan nasional 2. Fasilitasi kemitraan untuk pembiayaan dan pemasaran bagi usaha mikro

3.3. Program dan Kegiatan TA. 2025

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri pada TA. 2025 direncanakan melaksanakan Program dan Kegiatan sebanyak 7 program, 11 kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Mebel

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan yang di laksanakan :

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi SimpanPinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;

   Sub kegiatan:
   - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

Sub kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota;

Sub kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Sub kegiatan :

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

Sub kegiatan :

- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

7. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Sub kegiatan :

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Mengacu pada Rencana Kerja berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, jumlah pagu indikatif yang direncanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.3.

TABEL 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kediri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	16	17
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			**15.415.813.087,00**				**12.287.050.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**15.415.813.087,00**				**12.287.050.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**15.415.813.087,00**				**12.287.050.000,00**	
1	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota***	**100%**	**5.166.938.827,00**				**6.678.050.000,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	7 laporan	16.955.600,00			Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14.550.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.911.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	8.100.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.044.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6.450.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	12 bulan	4.024.168.803,00			pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.734.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3.836.933.799,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.552.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	180.675.704,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	177.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.559.300,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah peserta pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	45 orang	7.870.000,00			pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	78.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	7.870.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	78.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah*	12 bulan	340.918.600,00			sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	465.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.547.500,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	28.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	78.450.500,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	30.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	19.022.400,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	29.265.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	32.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.547.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127.544.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	257.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	64.541.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah barang milik daerah yang di adakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah*	94 unit	202.781.310,00			sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	322.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	180.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	190.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	97.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	22.781.310,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 bulan	376.167.600,00			pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	791.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	110.166.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	515.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	262.001.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	270.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara*	55 unit	198.076.914,00			pegawai dan sarana prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	273.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	44.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai dan sarana prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	55.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai dan sarana prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	68.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	99.076.914,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai dan sarana prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	125.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi***	**13.04%**	**149.667.300,00**				**326.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi*	200 unit usaha	149.667.300,00			koperasi di Kabupaten Kediri	326.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi								
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125 Unit Usaha	121.699.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	koperasi di Kabupaten Kediri	261.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	75 Unit Usaha	27.968.300,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	koperasi di Kabupaten Kediri	65.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat***	**1.71%**	**20.006.400,00**				**35.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya*	460 unit usaha	20.006.400,00			Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpam Pinjam Koperasi	35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	460 Unit Usaha	20.006.400,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpam Pinjam Koperasi	35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**	**-**	**77.152.100,00**				**380.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah peserta kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian*	285 orang	77.152.100,00			SDM koperasi di Kabupaten Kediri	380.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	285 Orang	77.152.100,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SDM koperasi di Kabupaten Kediri	380.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

5	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase Partisipasi Koperasi Aktif***	**33.67%**	**344.932.060,00**				**435.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah peserta kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan*	290 unit usaha	344.932.060,00			Koperasi dan SDM Koperasi di Kabupaten Kediri	435.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota								
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	290 Unit Usaha	344.932.060,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Koperasi dan SDM Koperasi di Kabupaten Kediri	435.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
6	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase Partisipasi Usaha Mikro***	**26.02%**	**1.975.546.000,00**				**2.083.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitasi perizinan,sosialisasi perijinan dan pengembangan produk dan SDM UMKM*	2460 orang	1.975.546.000,00			usaha mikro dan masyarakat di Kabupaten Kediri	2.083.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	19.188.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	usaha mikro dan masyarakat di Kabupaten Kediri	35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	620 Unit Usaha	118.650.300,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	usaha mikro dan masyarakat di Kabupaten Kediri	247.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	630 Unit Usaha	1.434.757.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	usaha mikro dan masyarakat di Kabupaten Kediri	950.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro								
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	640 Orang	37.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	usaha mikro dan masyarakat di Kabupaten Kediri	53.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan								
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	510 Orang	365.950.700,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	usaha mikro dan masyarakat di Kabupaten Kediri	798.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
7	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya***	**8.27%**	**7.681.570.400,00**				**2.350.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran*	1120 orang	7.681.570.400,00			usaha mikro dan masyarakat di Kabupaten Kediri	2.350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi								
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1120 Unit Usaha	7.681.570.400,00	-	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	usaha mikro dan masyarakat di Kabupaten Kediri	2.350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	J U M L A H				**15.415.813.087,00**				**12.287.050.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja ***Dinas Koperasi dan Usaha Mikro*** Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro tahun lalu serta Rencana Kerja tahun 2025

Rencana Kerja ***Dinas Koperasi dan Usaha Mikro*** Kabupaten Kediri Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggara program/kegiatan ***Dinas Koperasi dan Usaha Mikro*** dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN KEDIRI

Santoso, S.Sos, M.M.
Pembina Tk.I
NIP 197004151993011001

Dipindai dengan CamScanner